



**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Juni 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dan masalah aktual lainnya.
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Susi Daryati, SH, MH/ Plt. Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP C. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/ Kepala BNPP dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI agenda pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dan masalah aktual lainnya, pada hari Kamis, 20 Juni 2019, dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan terkait Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp3.405.051.729.000,-** (*tiga trilyun empat ratus lima milyar lima puluh satu juta tujuh ratus dua*

puluh sembilan ribu rupiah). Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Rapat Pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menerima penjelasan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp1.911.272.940.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus sebelas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), dan akan membahas lebih lanjut pada Rapat Pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.
3. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan terkait Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2020 Badan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp160.697.974.000,-** (*seratus enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Rapat Pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.
4. Komisi II DPR RI menerima penjelasan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh BNPP sebesar **Rp.99.000.000.000,-** (*sembilan puluh sembilan milyar rupiah*), dan akan membahas lebih lanjut pada Rapat Pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.
5. Komisi II DPR RI menerima penjelasan anggaran DKPP tahun 2020 sebesar Rp10.720.000.000,- (*sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*) yang telah teranggarkan melalui Bawaslu RI, sedangkan terhadap usulan anggaran tambahan sebesar Rp. 147.169.784.000,- (*seratus empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) agar dalam masa transisi anggaran dimasukkan dalam usulan anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 untuk dibahas lebih lanjut bersama Komisi II DPR RI pada Rapat Pembahasan RAPBN tahun 2020 selanjutnya.
6. Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah c.q. Kementerian Dalam Negeri agar dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, DKPP dijadikan sebagai Satker yang memiliki bagian anggaran tersendiri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 20 Juni 2019
KETUA RAPAT

TTD

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
A-419

